

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PADANG PARIAMAN TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Sebagai lembaga fungsi penunjang urusan pemerintahan, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman,

Juli 2020

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM NIP. 19680909 199803 1 010



Daftar Isi

KATA I	PENGANTAR	
BAB I F	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penyusunan	θ
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU dan CAPAIAN RENSTRA	10
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019	10
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	27
2.3	Isu Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	28
2.4	Kondisi Personil dan Sumber Daya Manusia	36
2.5	Review Terhadap Rancangan Awal OPD	38
2.6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	38
BAB III	I TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	39
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	43
3.3	Program dan Kegiatan	47
BAB IV	PENUTUP	49

LAMPIRAN

- I. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- II. Tabel Hasil Pemetaan Program dan Kegiatan Matrik Recana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
- III. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021.



Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dengan demikian, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Oleh sebab itu karena Tahun 2020 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka untuk menyusun RKPD dan Renja SKPD, kita harus mempedomani :

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2020-2024,
- 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025,
- 4) RPJMD Propinsi Sumbar 2016-2021,
- 6) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025
- 7) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Sekretariat DPRD. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peratutan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Permendagri 72 Tahun 2016 Tentang Pedomana Pembangunan Wilayah Terpadu;



- 16) Permendagri 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
- 17) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemenrintah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah;
- 19) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1447);
- 20) Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provindi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10)
- 26) Peraturan Bupati Padang Pariaman No 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- 27) Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman



- 28) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman
- Peraturan Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor /050/BPP/KEP 2019 tentang Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD disusun untuk:

- memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah.
- 2. Sebagai acuan dan pedoman serta memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Bapelitbangda tahun 2021 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah:

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman.



1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Sekretariat DPRD disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:



- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD



5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang



menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021. Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dan DPA Tahun 2018 Sekretariat DPRD Padang Pariaman selaku Perangkat Daerah memperoleh alokasi anggaran belanja langsung adalah sebagai berikut : Rp. 2.787.834.002,92 Realisasi Rp. 2.582.333.950,00 92,63% dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 17.482.048.662,28 dan Realisasi Rp. 17.065.581.725,00. Atau 97,62%.

Hasil Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Halini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 dan Realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD dan Realisasi APBD Tahun 2019 dapat kita lihat secara lebih terperinci dalam table 2.1 dan table 2.2 berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN BAPELITBANGDA
TAHUN 2019

No	Р	ROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
I	1	gram Pelayanan ninistrasi Perkantoran	1.687.400.000	1.687.400.000 1.623.709.293 9		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan persentase capaian 96,23%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000	99.967.070	99,97	Tesedianya alat tulis, cetak,penggandaan prangko materai selama 12 bulan dengan persentase capaian 99,97%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000	140.336.923	96,12	Terbayarnya layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet selama 11 bulan dengan pesentase capaian 96,12%
	3. Penyediaan Jasa Administrasi		194.400.000	189.670.000	97,57	Pembayaran honor PA, KPA, PPK dan PPTK selama 12 bulan dengan persentase capaian

No	P	ROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
		Keuangan				97.57%
	4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000	178.760.200	99,31	Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor selama 1 tahun dengan persentase capaian 99,31%
	5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	19.984.800	99,92	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor selama 1 tahun dengan persentase capaian 99,92%
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	200.000.000	173.022.000	86,51	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD selama 1 tahun dengan persentase capaian 86,51%
	7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.000.000	35.184.700	63,97	Tersedianya makanan dan Minuman rapat-rapat di Sekretariat DPRD dan Tamu DPRD/ Sekretariat DPRD serta jasa tenaga pramusaji selama 1 tahun dengan persentase capaian 63,97%
	8.	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	161.000.000	157.495.600	97,82	Terlaksananya konsultasi komisi / pansus (5x) / BK (2x) / Banggar (2x) / Balegda (2x) Bamus (2x))dan konsultasi-konsultasi Sekretariat. Sebanyak 11 kali dengan persentase capaian 97,82%
	9.	Penyediaan jasa pendukung perkantoran	504.000.000	503.600.000	99,92	Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai kantor (jasa tenaga pramusaji,pramubakti,sopir,sespri pimpinan DPRD,ajudan ketua DPRD) dengan presentase capaian 99,92%
	10	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	127.000.000	125.688.000	98,97	Terlaksananya pelayanan medical check up/general chech up bagi anggota DPRD dan keluarga dengan presentase capaian 98,97%
II	Sarc	gram Peningkatan ana dan Prasarana aratur	1.997.000.000	1.932.213.107	96,76	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan persentase capaian 96,76%
	1.	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	675.000.000	662.907.250	98,21	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dengan persentase capaian 98,21%

No	PI	ROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
	2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	571.125.000	551.717.800	96,54	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan persentase capaian 96,54%
	3.	Pengadaan Mebeleur	18.000.000	15.840.000	88,00	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur pada kantor DPRD dengan persentase 88,00 %
	4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	195.000.000	179.967.000	92,29	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan persentase capaian 92,29%
	5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	217.500.000	208.788.032	95,99	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas dengan persentase capaian 95,99%
	6.	Pemeliharaan 120.000.000 118.92 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		118.921.500	99,10	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala dengan persentase capaian 96,78%
	7. Rehab Pagar Belakang Kantor DPRD		200.000.000 194.071.525 97,0		97,04	Terlaksananya Rehab Pagar belakang kantor DPRD dengan persentase capaian 97,04 %
III	_	gram Peningkatan olin Aparatur	690.580.000	686.029.200	99,34	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan persentase capaian 98,42%
	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	690.580.000	686.029.200	99,34	Terlaksananya pengadaan mesin / kartu absensi sebanyak 1 unit dengan persentase capaian 99,34%
IV	Кар	gram Peningkatan asitas Sumber Daya Iratur	150.000.000	149.212.922	99,48	Jumlah SKPD yang mengikuti Diklat teknis dengan persentase capaian 94,61%
	1.	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	150.000.000	149.212.922	99,48	jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Implementasi perundang undangan bagi sekretariat DPRD sebanyak 42 orang dengan persentase capaian 99,48%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		74.400.000	73.161.155	98,33	Jumlah Laporan Tepat waktu dengan persentase capaian 93,75%
	Penyusunan Iaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		74.400.000	73.161.115	98,33	Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD dalam rangka penyusunan Renja,lakip, Renstra, LPPD dll dengan persentase capaian 98,33%

No	PI	ROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
VI	kom	gram pengembangan nunikasi,informasi dan dia massa	336.100.000	313.600.600	93,31	Persentase Peningkatan pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang- Undangan dengan persentase capaian 93,31%
	1.	Pembuatan Varia/Majalah/Brosu r	0.0	0.0	00,00	
	2.	Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda	94.100.000	94.032.600	99,93	Terlaksananya Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dengan persentase capaian 99,93 %
	3.	Peliputan DPRD kabupaten padang pariaman	225.000.000	204.559.000	90,92	Terlaksananya peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya denga presentase capaian 90,92%
	4.	Penyediaan dan pengelolaan media informasi DPRD	17.000.000	15.009.000	88,29	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan media informasi dan website DPRD Ka. Padang Pariaman dengan presentase capaian 88,29%
VII	kap	gram peningkatan asitas lembaga wakilan rakyat daerah	18.470.495.703	17.607.134	95,33	Terlaksananya pembahasan ranperda oleh DPRD,terbanyaknya honor tenaga ahli freksi DPRD dan kelompok pakar/tim ahli,terlaksananya penyusunan/pembahasan ranperda hak inisiatif dewan dengan presentase capaian 95,33 %
	1.	Pembahasan rencangan peraturan daerah	960.600.000	851.094.000	88,60	Terlaksananya Ranperda yang disetujui DPRD, keputusan DPRD yang ditindak lanjuti dengan persentase 88,60 %
	2.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	10.000.000	3.102.000	31,02	Terlaksananya hearling/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama denga presentase capaian 31,02 %
	3.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	216.000.000	205.711.710	95,24	Terlaksananya rapat alat kelengkapan DPRD, rapat fraksi DPRD dan rapat DPRD dengan mitra kerja dengan presentase capaian 95,24%

No	P	ROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
	4.	Rapat-rapat paripurna	194.000.000	129.922.550	66,97	Terlaksananya rapat rapat pariputna DPRD dengan presentase capaian 66,97%
	5.	Kegiatan Reses	446.100.000	408.085.350	91,48	Terlaksananya rases dapil anggota DPRD dengan presentase capaian 91,48%
	6.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.279.300.000	2.218.022.388	97,31	Terlaksananya Bintek dan Workshop anggota DPRD sebanyak 5 kali dengan persentase capaian 97,31%
	7.	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	10.000.000	3.600.000	36,00	Terlaksananya Peninjauan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan persentase capaian 3.75%
	8.	Penunjang operasional pimpinan DPRD	3.005.500.000	2.751.970.755	91,56	Terlaksananya penunjang operasional pimpinan DPRD,lancaenya kebutuhan penunjang dan protokoler pimpinan anggota DPRD dengan presentase capaian 91,56%
	9.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	3.238.500.000	3.194.440.098	98,64	Terlaksananya agenda kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah dengan presentase capaian 98,64%
	10	Rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lembaga tinggi lainnya	7.644.995.703	7.379.052.310	96,52	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi komisi/pansus,alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD (koordinasi/konsultasi komisi,terlaksananya/diikiti undangan dan rapat-rapat bagi anggota DPRD dalam daerah dengan presentase capaian 96,52%
	11	Rapat-rapat paripurna istimewa	465.500.000	462.133.200	99,28	Terlaksananya rapat rapat paripurna istimewa dengan presentase capaian 99,28%
	JUMLAH					

TABEL 2.2 REKAPITULASI REALISASI KINERJA EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT S/D TAHUN 2020

Kabupaten Padang Padang Pariaman

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Real Target Renstra S Berja	KPD s/d Tahu
Kode					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4
1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Kualitas pelayanan administrasi di perkantoran								
1.20.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Terbayarnya alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
1.20.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Terbayarnya layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output: Terlaksananya Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output: Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100



	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018		ealisasi Kinerja Pr giatan Tahun 2019		Target Program dan Kegiatan Perkiraan Re Target Renstra Bei		
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
1.20.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output: Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Output: Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	45 orang, 12 Bulan	45 orang, 12 Bulan	45 orang, 12 Bulan	45 orang, 12 Bulan	100	45 orang, 12 Bulan	45 orang, 12 Bulan	100
1.20.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output: Tersedianya makanan dan Minuman Tamu dan rapat- rapat kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output: Terlaksananya kegiatan konsultasi/ koordinasi Sekretariat DPRD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Output: Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai kantor (jasa tenaga pramusaji, pramubakti, sopir, staf pimpinan DPRD, fraksi DPRD dan media informasi)	23 orang, 12 Bulan	23 orang, 12 Bulan	23 orang, 12 Bulan	23 orang, 12 Bulan	100	23 orang, 12 Bulan	23 orang, 12 Bulan	100
1.20.04.01.21	Penyediaan jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Output: Terlaksananya pelayanan medical check up bagi Anggota DPRD dan keluarga, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Sekwan, dan Sekretariat (Min 10 orang Sekretariat)	1 kali, 1 tahun	1 kali, 1 tahun	1 kali, 1 tahun	1 kali, 1 tahun	100	1 kali, 1 tahun	1 kali, 1 tahun	100



	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018		ealisasi Kinerja Pr giatan Tahun 201		Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Realisasi C Target Renstra SKPD s, Berjalan	
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome: Persentase sarana prasarana kerja aparatur yang terpenuhi								
1.20.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda empat 2(dua) kendaraan roda dua 2(dua) buah	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
1.20.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output: Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
1.20.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Output: Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor (Kursi)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan berkala Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output: Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas kantor	12 Bulan, 12 unit	12 Bulan, 12 unit	12 Bulan, 12 unit	12 Bulan, 12 unit	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Output: Terlaksananya rehab atap gedung DPRD Bagian depan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100



	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			dan Kegiatan Target Renstra		isasi Capaian KPD s/d Tahu Ilan
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
1.20.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Outcome: Persentase disiplin aparatur								
1.20.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output: Tersedianya bahan Pakaian Anggota dan Sekretariat DPRD	5 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	5 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	5 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	5 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	100	5 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	5 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	100
1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome: Persentase kualitas sumber daya aparatur								
1.20.04.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output: Terlaksananya kegiatan bintek, sosialisasi dan implementasi perundang undangan bagi sekretariat DPRD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.20.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Outcome:Persentase tertib administrasi kerja dan keuangan								
	dan keuangan	Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu ke Inspektorat								
1.20.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip,LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100



	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018		ealisasi Kinerja Pr giatan Tahun 201		dan Kegiatan Target Renstr		isasi Capaian KPD s/d Tahu Ian
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
1.25.1.20.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Outcome: Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi								
1.25.1.20.04.15. 11	Pembuatan Varia / Majalah/ Brosur	Output: Terlaksaanya Pembuatan Varia / Majalah DPRD Kab. Padang Pariaman	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
1.25.1.20.04.15. 12	Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda	Output: Terlaksananya pembuatan Buku Kalender dan buku agenda	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
1.25.1.20.04.15. 13	Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman	Output: Terlaksananya peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 paket	1 paket	100
1.25.1.20.04.15. 14	Penyediaan dan Pengelolaan Media Informasi DPRD	Output: Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan media informasi dan website DPRD Kab. Padang Pariaman	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Outcome: Ranperda yang disetujui DPRD								
		Outcome: Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	1	1	1	1				



	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Reali Target Renstra Si Berja	KPD s/d Tahu
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
		Outcome: Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	1	1	1	1				
		Outcome: Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	0,72	0,72	0,72	0,72				
		Outcome: Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	0,81	0,81	0,81	0,81				
1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Output : Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda				
		Output: Terlaksananya penyusunan Ranperda Hak inisiatif Dewan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				
		Output: Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar/ tim ahli	8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)	8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)	8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)	8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)				



	Urusan/Bidang Urusan		Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Kegiatan Tahun 2019 da Kegiatan Tahun 2019				Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Reali Target Renstra Si Berja	KPD s/d Tahu	
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) Kegiatan (output)	Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	SKPD) s/d dengan Tahun	Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
1.20.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Output: Terlaksananya Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali				
1.20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Output : Terlaksananya Rapat rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat Fraksi DPRD	197 kali	197 kali	197 kali	197 kali				
		Output : Terlaksananya Hearing, koordinasi dan rapat kerja komisi dengan Pejabat pemerintah Daerah (Mitra Kerja)	4 komisi, 12 kali	4 komisi, 12 kali	4 komisi, 12 kali	4 komisi, 12 kali				
1.20.04.15.04	Rapat-rapat paripurna	Output: Terlaksananya rapat rapat paripurna dprd	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali				
1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	Output: Terlaksananya Reses dapil Anggota DPRD	3 kali, 40 orang	3 kali, 40 orang	3 kali, 40 orang	3 kali, 40 orang				
1.20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Output: Terlaksananya Bintek dan Workshop anggota DPRD	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali				
1.20.04.15.11	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Output: Terlaksananya Peninjauan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun				



	Urusan/Bidang Urusan		Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Hasil		Target dan Realisasi Kinerja Progran Kegiatan Tahun 2019		•	Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Reali Target Renstra Si Berja	KPD s/d Tahu
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) Kegiatan (output)	Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
1.20.04.15.23	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Output: Terlaksananya penunjang operasional pimpinan DPRD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				
1.20.04.15.24	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah	Output: Terlaksananya agenda kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali				
1.20.04.15.25	Rapat koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi komisi / pansus, alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD	komisi (4 kalix4 komisi), Pansus (2 kali), BK (2 kali) , Banggar (2 kali), Balegda (2 kali), Bamus (2 kali), anggota DPRD (3 kali) dan plus sekretariat (pendamping), dan dalam daerah	komisi (4 kalix4 komisi), Pansus (2 kali), BK (2 kali), Banggar (2 kali), Balegda (2 kali), anggota DPRD (3 kali) dan plus sekretariat (pendamping), dan dalam daerah	komisi (4 kalix4 komisi), Pansus (2 kali), BK (2 kali), Banggar (2 kali), Balegda (2 kali), Bamus (2 kali), anggota DPRD (3 kali) dan plus sekretariat (pendamping) , dan dalam daerah	komisi (4 kalix4 komisi), Pansus (2 kali), BK (2 kali), Banggar (2 kali), Balegda (2 kali), Bamus (2 kali), anggota DPRD (3 kali) dan plus sekretariat (pendamping) , dan dalam daerah				



	Urusan/Bidang Urusan		Target Kinerja	Canaian Kinerja Hasii		Target dan Realisasi Kinerja Pro Kegiatan Tahun 2019		Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Real Target Renstra S Berja	KPD s/d Tahu
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) Kegiatan (output)	Program (Renstra SKPD) Tahun 2018)	Program dan Renstra SKPD) Renstra SKPD	Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD 2019	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra
1.20.04.15.xx	Rapat-rapat paripurna istimewa	Output: Terlaksananya rapat paripurna istimewa dprd dalam rangka Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD, dan rapat rapat paripurna istimewa DPRD lainnya	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali				

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 pada Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu sebesar Rp. **1.633.240.000,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **1.478.436.849,00** atau sebesar 90,52%. Dengan hasil yang dicapai :

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Pelayanan	1.633.240.000,00	1.478.436.849,00	90,52	154.803.151,00
Administrasi Perkantoran				
Penyediaan jasa surat menyurat	100.000.000,00	97.014.335,00	97,01	2.985.665,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	190.000.000,00	137.825.364,00	72,54	52.174.636,00
Penyediaan jasa adminstrasi keuangan	164.940.000,00	161.860.000,00	98,13	3.080.000,00
penyediaan jasa kebersihan kantor	180.000.000,00	154.605.950,00	85,89	25.394.050,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	9.652.000,00	48,26	10.348.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	163.800.000,00	149.753.500,00	91,42	14.046.500,00
Penyediaan makanan dan minuman	49.000.000,00	20.523.800,00	41,89	28.476.200,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	149.892.400,00	99,93	107.600,00
Penyediaan jasa pendukung perkantoran	597.000.000,00	583.503.500,00	97,74	13.496.500,00
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	18.500.000,00	13.806.000,00	74,63	4.694.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dari anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu sebesar Rp. **763.700.000,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **685.817.575,00** atau sebesar 89,80%. Dengan hasil yang dicapai :

2.4
Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Peningkatan Sarana	763.700.000,00	685.817.575,00	89,80	77.882.425,00
dan Prasarana Aparatur				
Pengadaan peralatan gedung kantor	209.700.000,00	195.360.000,00	93,16	14.340.000,00
Pengadaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	170.000.000,00	161.302.600,00	94,88	8.697.400,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	254.000.000,00	217.472.975,00	85,62	36.527.025,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	130.000.000,00	111.682.000,00	85,91	18.318.000,00

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dari anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu sebesar Rp. **860.000.000,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **836.994.000,00** atau sebesar 97,32%. Dengan hasil yang dicapai :

2.5 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Peningkatan Disiplin	860.000.000,00	836.994.000,00	97,32	23.006.000,00
Aparatur				
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	860.000.000,00	836.994.000,00	97,32	23.006.000,00

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dari anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu sebesar Rp. **166.200.000,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **149.280.000,00** atau sebesar 89,82%. Dengan hasil yang dicapai :

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Peningkatan	166.200.000,00	149.280.000,00	89,82	16.920.000,00
Kapasitas Sumber Daya				
Aparatur				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	166.200.000,00	149.280.000,00	89,82	16.920.000,00

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dari anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu sebesar Rp. **60.000.000,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **41.302.525,00** atau sebesar 68,84%. Dengan hasil yang dicapai :

Tabel 2.7

Realisasi Anggaran Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Pengembangan	60.000.000,00	41.302.525,00	68,48	18.697.475,00
Sistem Pelaporan Capaian				
Kinerja dan Keuangan				
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60.000.000,00	41.302.525,00	68,84	18.697.475,00

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Dari anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu sebesar Rp. **18.372.634.527,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **17.044.792.373,00** atau sebesar 92,77%. Dengan hasil yang dicapai :

Tabel 2.8

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Peningkatan	18.372.634.527,00	17.044.792.373,00	92,77	1.327.842.154,00
Kapasitas Lembaga				
Perwakilatan Rakyat Daerah				
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.457.620.000,00	1.397.280.825,00	95,86	60.339.175,00
Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh	30.500.000,00	10.087.000,00	33,07	20.413.000,00
Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	105.550.000,00	98.648.750,00	93,46	6.901.250,00
Rapat Rapat Paripurna	125.750.000,00	124.262.300,00	98,82	1.487.700,00
Kegiatan Reses	349.147.800,00	308.930.500,00	88,48	40.217.300,00
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.566.391.525,00	2.429.828.125,00	94,68	136.563.400,00
Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	3.350.000,00	16,75	16.650.000,00

Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	2.551.000.000,00	2.345.522.421,00	91,95	205.477.579,00
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	2.917.200.000,00	2.547.608.000,00	87,33	369.592.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi Lainnya	7.334.175.202,00	6.907.419.802,00	94,18	426.755.400,00
Rapat rapat Paripurna Istimewa	915.300.000,00	871.854.650,00	95,25	43.445.350,00

7. Program Pengembangan Komunkasi, Informasi dan Media Massa

Dari anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu sebesar Rp. **216.150.000,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **180.422.500,00** atau sebesar 83,47%. Dengan hasil yang dicapai :

Tabel 2.9

Realisasi Anggaran Program Pengembangan Komunkasi, Informasi dan Media
Massa

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Pengembangan	216.150.000,00	180.422.500,00	83,47	35.727.500,00
Sistem Pelaporan Capaian				
Kinerja dan Keuangan				
Penyediaan dan Pengelolaan Media Informasi DPRD	12.250.000,00	9.424.000,00	76,93	2.826.000,00
Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman	203.900.000,00	170.998.500,00	83,86	32.901.500,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun Sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembagunan namun belum lagi optimal.

Melihat kondisi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selaku lembaga teknis yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sekretariat DPRD sebagai lembaga

teknis di bidang kesekretariatan DPRD mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui :

- 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- 2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi, dan sinergi antar daerah.
- 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara sfisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja
Sekretariat DPRD Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	INDIKATOR KINERJA		
	UTAMA		
1.	Meningkatnya jumlah produk	Persentase capaian Prolegda	100 %
	hokum daerah		
2.	Meningkatnya Kualitas	Persentase tingkat kepuasan	85 %
	Pelayanan Sekretariat DPRD	anggota dprd	

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;



- c. Penyelengggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Fasilitasi hubungan kemasyarakatan ; dan
- e. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun rincian tugas dari masing-masing Pejabat dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan

Ringkasan Tugas :

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Dalam menunjang kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ini terdapat 3 bagian yaitu:

1. Bagian Umum, yang mempunyai tugas:

i. Ringkasan Tugas:

Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis dibidang umum, pelayanan rumah tangga DPRD serta penyusunan dan penyediaan acara kegiatan DPRD dan melaksanakan tugas keprotokolan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyiapan undangan dan bahan-bahan untuk kegiatan persidangan, rapat paripurna, rapat fraksi dan rapat rapat lainnya;
- b. pelaksanaan pekerjaan surat-menyurat yang diperlukan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- c. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD;
- d. pengaturan tatalaksana keprotokoleran terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat DPRD;
- f. pengurusan kendaraan dan barang-barang lainnya dan penyelenggaraan kebersihan serta keamanan pada Sekretariat DPRD;
- g. perencanaan dan pelayanan kebutuhan peralatan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan pada kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
- h. pelaksanaan pengadaan dan inventarisasi peralatan/perlengkapan kantor dan rumah dinas pimpinan DRPD;
- i. pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dan anggota DPRD; dan/ atau



j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- I. Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian;
 - i. Ringkasan Tugas:

Menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dibidang ketatausahaan Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD.

- ii. Uraian Tugas:
- a. penyusunan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
- b. penyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;
- d. pengaturan dan pengawasan penerimaan surat masuk, surat keluar dan pengiriman surat;
- e. penyampaian laporan secara lisan dan / atau tulisan kepada Sekretariat DPRD melalui Kepala Bagian Umum; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- II. Sub Bagian Perlengkapan dan rumah tangga;
 - i. Ringkasan Tugas:
 - melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, pengelolaan barang inventaris dan aset, seta melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kebersihan taman dan keamanan di lingkungan sekretariat DPRD.
 - ii. Uraian Tugas:
 - a. penyusunan kebijakan dan rencana pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD;
 - b. penerimaan dan pendistribusian barang dan aset Sekretariat DPRD;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset Sekretariat DPRD;
 - d. penyiapan tempat keperluan rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya
 - e. pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas;



- f. pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD;
- g. pengaturan keamanan dan pemeliharaan kebersihan ruangan kantor, gedung dan taman; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

III. Sub bagian hubungan masyarakat dan protokoler

i. Ringkasan tugas

memberikan pelayanan informasi dan aspirasi kepada masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kehumasan dan keprotokolan.

- ii. Uraian tugas
- a. penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada subbagian Humas dan Protokoler;
- b. penyiapan dan pengaturan pelaksanaan acara yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD;
- c. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu DPRD yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
- d. pengaturan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan dan upacara resmi;
- e. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) danStandar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bagian Persidangan, yang mempunyai tugas:

i. Ringkasan Tugas:

Membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan anggota DPRD.

- ii. Uraian Tugas:
- a. penyusunan program kegiatan bagian persidangan dan jadwal kegiatan rapat dan sidang DPRD;



- b. penyiapan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD pada waktu rapat dan siding;
- c. pelaksanaan pencatatan dan penyusunan risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD;
- d. penyiapan rancangan keputusan DPRD dan produk peraturan perundangundangan;
- e. penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- f. pengumpulan dan pengolahan data pengkajian peraturan perundang-undangan yang diperlukan.
- g. pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian kegiatan DPRD; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- I. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - Ringkasan Tugas: melaksanakan dan merencanakan kegiatan Rapat dan Persidangan DPRD, menyimpulkan dan melaporkan hasil rapat dan persidangan serta membuat dan menyusun risalah rapat.
 - ii. Uraian Tugas:
 - a. penyiapan dan penyusunan program/jadwal, undangan kegiatan DPRD;
 - b. penyediaan bahan-bahan kebutuhan persidangan dan rapat DPRD;
 - c. pelaksanaan kegiatan sidang dan rapat-rapat sesuai agenda Badan Musyawarah DPRD;
 - d. pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi anggota DPRD;
 - e. penyelenggaraan pedoman penyusunan dan pembuatan risalah Rapat;
 - f. penyusunan, pengumpulan, penyimpanan dan pembuatan laporan hasil sidang DPRD; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- II. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - i. Ringkasan Tugas:



mengumpulkan dan menghimpun peraturan Perundang-Undangan, melakukan evaluasi, pengkajian dan penelitian terhadap ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.

- ii. Uraian Tugas:
- a. pengumpulan dan pengevaluasian peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
- b. penyiapan rancangan Surat Keputusan Pimpinan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. penghimpunan Draft Produk-Produk Hukum yang akan dibahas DPRD;
- d. pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD;
- e. penyusunan saran dan pertimbangan serta kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
- f. pendokumentasian bahan serta produk peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan; dan/ atau;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sub Bagian Dokumentasi dan perpustakaan

- i. Ringkasan Tugas:
 - mencari, menghimpun, mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data di Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.
- ii. Uraian Tugas:
- a. penyusunan program kerja di Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi;
- b. pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan di bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan sekretariat DPRD;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian
 Perpustakaan dan Dokumentasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait bidang perpustakaan dan dokumentasi dilingkungan DPRD;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- f. penyelenggaraan pelayanan dokumentasi produk hukum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan dokumentasi; dan/ atau



h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas:

i. Ringkasan Tugas:

Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang administrasi keuangan, pengelolaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi penggunaan anggaran Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.

iii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan rencana anggaran kegiatan sekretariat dan anggota DPRD;
- b. pelaksanaan Verifikasi dan pembukuan keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
- c. penyusunan laporan keuangan, LPPD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD.
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
- e. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bagian keuangan; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. Sub Bagian Anggaran;

i. Ringkasan Tugas:

Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyediaan anggaran DPRD, pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD dan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.

- ii. Uraian Tugas:
 - a. penyusunan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD.
 - b. penyelenggaraan pengajuan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran sekretariat dan anggota DPRD.
 - c. penyusunan Renstra, Lakip dan LPPD Kepala Daerah Sekretariat DPRD.



- d. pengelolaan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD.
- e. penyusunan dan penetapan anggaran kas sekretariat DPRD; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Sub Bagian Perbendaharaan

i. Ringkasan Tugas:

menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta melakukan penerimaan dan pembayaran setiap kegiatan sekretariat dan anggota DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan, pengetikan, pengajuan anggaran untuk mendapatkan SPMU.
- b. pelaksanaan permintaan uang dan pencairan SPMU.
- c. pelaksanaan perbendaharaan, belanja langsung dan belanja tidak langsung di lingkungan Sekretariat DPRD.
- d. pelaksanaan pembayaran untuk kegiatan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sub bagian Verifikasi dan Akuntansi

i. Ringkasan Tugas

melakukan verifikasi, menyelenggarakan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan danmelakukan penatausahaan keuangan Sekretariat dan anggota DPRD.

ii. Uraian Tugas

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan belanja publik, fisik dan non fisik.
- b. penyelenggaraan verifikasi belanja publik fisik dan belanja publik non fisik.
- c. penagihan dan peringatan atau teguran tertulis agar segera membuat laporan pertanggungjawaban baik belanja aparatur, belanja publik fisik dan non fisik;



- d. penelitian dan pengevaluasian dokumen yang berkaitan denganpembayaran,
 SPJ realisasi belanja;
- e. pencatatan hasil pengesahan baik dokumen SPJ/bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran dan penyetoran kembali; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Kondisi Personil dan Sumber Daya Manusia

Secara umum kondisi jumlah personil dan SDM di Sekretariat DPRD masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan lingkup kerja yang dilaksanakan terkait dengan fasilitasi kegiatan DPRD karena jumlah anggota DPRD periode Tahun 2019-2024 yang berjumlah sebanyak 40 orang.

Jika dilihat dari jumlah dan komposisi personil dilihat dari struktur jabatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat seperti berikut :

TABEL 2.11
STRUKTUR JABATAN SEKRETARIAT DPRD MENURUT ESSELONERING

		E			
No.	NAMA JABATAN	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF
1.	Sekretaris Dewan	✓			
2.	Bagian Umum		√		4
3.	Bagian Persidangan		√		4
4.	Bagian Keuangan		√		3
5.	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian			✓	
6.	Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler			√	
7.	Sub Bagian Hukum dan Perundangan			√	
8.	sub bagian rapat dan risalah			√	
9.	Sub Bagian Dokumentasi dan			✓	

JUMLAH		1	3	9	11
12.	Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi			√	
11.	Sub Bagian Anggaran			√	
10.	Sub Bagian Perbendaharaan			√	
	Perpustakaan				

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2020

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari golongannya, sebagai berikut:

TABEL 2.12

KOMPOSISI PNS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2020

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	13
3.	Golongan II	7
4.	Golongan I	0
	JUMLAH	24

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2020

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD menghadapi permasalahan antara lain :

- 1. Masih kurangnya SDM di Sekretariat DPRD baik kualitas maupun kuantias dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan
- 2. Masih kurangnya disiplin aparatur dan anggota DPRD
- 3. Belum optimalnya capaian kinerja dari anggota DPRD dalam pelaksanaan Tupoksi nya sebagai lembaga legislasi
- 4. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis terkadang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi
- 5. Kondisi dan jumlah sarana prasarana yang belum maksimal

- 6. Kurangnya referensi di dalam pembahasan suatu permasalahan sering menjadi kendala dan keterlambatan proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi dan keuangan
- 7. Koordinasi internal dan eksternal belum optimal

2.5 Review terhadap Rancangan Awal OPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD (Renstra OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (Renja OPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2021 merupakan rencana kerja akan disusun untuk dituangkan dalam rencana Strategis Sekretariat DPRD (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2016-2021, Renja Sekretariat DPRD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan memeperhatikan pada rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indicator makro, indicator ekonomi dan social.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada SKPD Sekretariat DPRD yang merupakan sinergisitas perencanaan mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan OPD, maka untuk tahun 2021 pada Sekretariat DPRD tidak ada usulan skala prioritas dari hasil musrenbang. Adapun program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana tahun 2020 berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan pembangunan dan Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan kabupaten Padang Pariaman dalam RKPD tahun 2021 diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran tahap keempat pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan juga mempeerhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Substansi penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupten Padang Pariaman Tahun 2021 pada RKPD Tahun 2021 berdasarkan dan memperhatikan :

- Keselarasan arah kebijakan dan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2021 dan Rancangan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- 2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2021.
- 3. Konsistensi antara kebijakan pusat, Provinsi dengan Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi.
- Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2021.



Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun tersebut akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman termasuk Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021

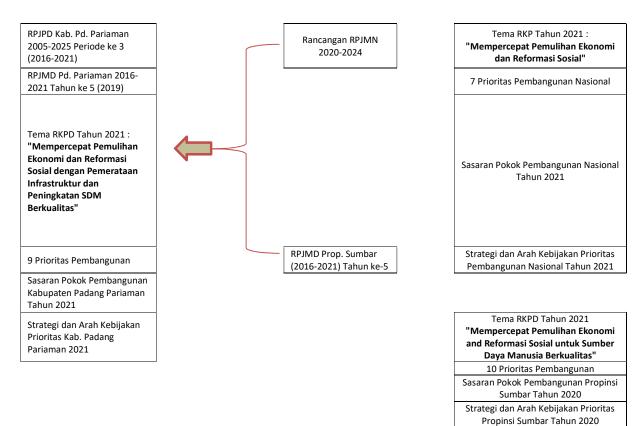
Tema Pembangunan Padang Pariaman	Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang
tahun 2021	Pariaman Tahun 2021
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan
Sosial dengan Pemerataan Infrastruktur dan	Berbudaya.
Peningkatan SDM Berkualitas.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
	peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
	3. Pengembangan infrastruktur berwawasan
	lingkungan dan tata ruang.
	4. Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan
	perikanan.
	5. Peningkatan potensi pariwisata unggulan.
	6. Peningkatan kontribusi sektor industri dan
	perdagangan terhadap perekonomian daerah.
	7. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
	8. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah
	9. Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan
	tanggap darurat dan Pemulihan pasca bencana.

Keterkaitan antara Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional , Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar tabel berikut ini :



Gambar 3.1

Keterkaitan Tema Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Tema
Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Tema Pembangunan Nasional Tahun
2021





Tabel 3.2.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2021

	Nasional Tahun 2021								
No	Prioritas Pembangunan RKP 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021						
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis (Prioritas 9)	Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan. (Prioritas 4)						
		Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur (Prioritas 6) Pelestrarian Lingkungan Hidup dan	Peningkatan Potensi Pariwisata Unggulan. (Prioritas 5) Peningkatan kontribusi sektor						
		Penanggulangan Bencana alam (Prioritas 10) Peningkatan Pemanfaatan Potensi	industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah. (Prioritas 6)						
		Kemaritiman dan Kelautan (Prioritas 7) Pengembangan Pariwisata, Industri,							
		Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi (Prioritas 8)							
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 4)							
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 4) Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. (Prioritas 7) Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (Prioritas 2)	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. (Prioritas 7)						
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Priroritas 3) Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis (Prioritas 9)							
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Priroritas 3) Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (Prioritas 2) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 4)	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusiadan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Prioritas 2)						
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABSSBK dalam Kehidupan Masyarakat (Prioritas 1)	Peningkatan kualitas kehidupan Beragama dan Berbudaya (Prioritas 1)						



5.	Memperkuat Infrastruktur untuk	Pengembangan Sumber Energi Baru	Pengembangan infrastruktur
	Mendukung Pembangunan	dan Terbarukan serta Pembangunan	berwawasan lingkungan dan
	Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur (Prioritas 6)	tata ruang (Prioritas 3)
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
		dalam Pemerintahan (Prioritas 5)	
		Meningkatkan Pemerataan dan	
		Kualitas Pendidikan (Prioritas 2)	
		Peningkatan Derajat Kesehatan	
		Masyarakat (Prioritas 3)	
6.	Membangun Lingkungan Hidup,	Pelestarian Lingkungan Hidup dan	Pengurangan Resiko Bencana,
	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Penanggulangan Bencana Alam	Kesiapsiagaan Tanggap
	dan Perubahan Iklim	(Prioritas 10)	Darurat dan PEmulihan Pasca
			Bencana. (Prioritas 9)
7.	Memperkuat Stabilitas	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan
	Polhukhankam dan Transformasi	Dalam Pemerintahan (Prioritas 5)	Pelayanan Daerah (Prioritas 8)
	Pelayanan Publik		

Tabel 3.2.Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2014-2019 dengan Visi MISi Padang Pariaman Tahun 2015-2020

	VISI RPJMN TAHUN 2014-2019		VISI MISI RPJPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2005-2025
	Ferwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, lan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong	P	adang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas
	MISI RPJMN TAHUN 2014-2019		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian visi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 yakni "*Mewujudkan Sekretariat DPRD yang Profesional dan Akuntabel*".



Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 karena tahun 2020 merupakan tahun keempat dari periode ketiga pelaksanaan RPJMD (Tahun 2016-2021) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2020 maka prioritas pembangunan adalah:

- Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi petanian serta peningkatan kapasitas penyuluh
- 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Iptek dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- 3. **Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan arah kebijakan melalui pengembangkan diklat aparatur, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatnya effisiensi dan effektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, fasilitasi dan singkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.
- 4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, menata dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi.
- 5. *Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat* dengan arah kebijakan melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru



- TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.
- Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi dengan arah kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,
- 7. **Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi** dengan arah kebijakan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar SKPD.
- 8. **Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana** dengan arah kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam
- 9. *Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan* dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Sekretariat DPRD tahun 2020 sesuai dengan prioritas yang ke tiga yaitu *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Misi* tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3. Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran
1	MEWUJUDKAN	1	Terlaksananya	1	Meningkatnya Jumlah	1	Persentase Capaian
	TATA KELOLA		Peningkatan		Produk Hukum Daerah		Prolegda
	PEMERINTAH YANG BAIK, BERKEADILAN, DEMOKRATIS, MELALUI PEMBINAAN APARATUR DAN		Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	2	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD
	PELAYANAN PUBLIK						

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

	Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	1	Persentase Capaian Prolegda	1	Meningkatkan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	2 3	Optimalisasi peran dan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Penataan regulasi daerah dan produk hukum daerah Peningkatan komunikasi dan hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	2	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	2	Meningkatkan 4 Mendorong keputusan DPR efektifitas dari Anggota DPRD dalam mengambil keputusan-keputusan dalam 6 Meningkatkan		keputusan DPRD yang lebih efektif dan responsif dengan kebutuhan masyarakat Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan
				3	Meningkatkan Sinergisitas, Kepatuhan dan Keselarasan Penyelengaraan Pemerintahan oleh Eksekutif dan Legislatif	7 8 9	Mendorong Penetapan APBD, APBD Perubahan dan LKPJ yang tepat waktu sesuai ketentuan Peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan Mendorong proses penyusunan anggaran yang lebih partisipatif dan transparan Mewujudkan anggaran daerah yang efisien dan efektif
				4	Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif	11	Penyediaan sarana/media penyampaian dan penjaringan aspirasi masyarakat Meningkatkan kualitas dan Intensitas Penjaringan serta Pengawasan DPRD
				5	Meningkatkan pelayanan kepada DPRD melalui	13	Meningkatkan Kualitas SDM dan Pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan



Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi			Arah Kebijakan
			peningkatan kapasitas aparatur Setwan untuk melayanai kegiatan- kegiatan		Perundang-undangan melalui pelaksanaan bintek, workshop, konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja anggota DPRD
			anggota DPRD	14	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pendukung anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
				15	Fasilitasi ketertiban dan kelancaran agenda rapat-rapat DPRD
				16	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Setwan
		6	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran setiap bulannya	17	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
		7	Meningkatkan sarana prasarana	18	Penyediaan sarana prasarana secara berkala
		8	Meningkatkan kualitas dan	19	Penambahan jumlah aparatur Sekretariat DPRD
			kompetensi aparatur	20	Pelaksanaan bimtek aparatur secara berkala dan berkesinambungan
		9	Meningkatkan kualitas disiplin kerja aparatur dan DPRD	21	Peningkatan disipin dan etos kerja aparatur dan DPRD melalui penyediaan sarana kerja, pakaian dinas DPRD dan aparatur
		9	Meningkatkan kompetensi dan kualitas perencana dan evaluasi	22	Peningkatan kualitas rencana kerja yang disusun
		10	Meningkatkan disiplin penyelesaian laporan SKPD	23	Peningkatan penyusunan dan pelaporan yang disusun lebih tepat waktu

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin OPD, pada tahun 2021, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD merupakan salah satu Instansi untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 meliputi 07 program dan 32 kegiatan sedangkan jika dilakukan pemetaan dan penyesuaian terhadap Permendagri No 90 Tahun 2019 maka

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Program dan Sub Kegiatan meliputi 3 Program, 14 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 20.598.099.200,-. dengan rincian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Dokumen Renja 2021 ini.



BAB IV PENUTUP

RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan SKPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder terkait. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman,

Juli 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM NIP. 19680909 199803 1 010



LAMPIRAN I

MATRIX RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

	Urusan/Bidang Urusan			Rencana Tahun	2021			
Kode Rekening	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	BELANJA			-	20.598.099.200,00			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			_	-			
	Gaji Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Keria	Jumlah gaji ASN yang Dibayarkan Jumlah Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Set. DPRD Set. DPRD					
	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Jumlah BOP	Set. DPRD					
	BELANJA LANGSUNG				20.598.099.200,00			
1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan		91%	1.886.800.000,00	-		
1.20.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Set. DPRD	12 Bulan	110.000.000,00	APBD	RUTIN	
1.20.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekwensi layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet yang dibayarkan	Set. DPRD	12 Bulan	170.000.000,00	APBD	RUTIN	
1.20.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Frekwensi Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	Set. DPRD	12 Bulan	250.000.000,00	APBD	RUTIN	
1.20.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	Set. DPRD	12 Bulan	150.000.000,00	APBD	RUTIN	

1.20.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Kantor yang disediakan	Set. DPRD	12 Bulan	15.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang disediakan	Set. DPRD	45 orang, 12 Bulan	175.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Frekwensi Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-rapat Kantor	Set. DPRD	12 Bulan	40.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi kegiatan konsultasi/ koordinasi Sekretariat DPRD	Dalam dan luar daerah	12 Bulan	150.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai kantor (jasa tenaga pramusaji, pramubakti, sopir, staf pimpinan DPRD, fraksi DPRD dan media informasi)	Set. DPRD	35 orang, 12 Bulan	706.800.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.01.21	Penyediaan jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Frekwensi Pelaksanaan medical check up bagi Anggota DPRD dan keluarga.	Set. DPRD	1 Kali, 40 Orang	120.000.000,00		RUTIN
1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana		91%	573.449.200,0		
1.20.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang disediakan	Set. DPRD	-	-	APBD	INSIDENTIL
1.20.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Set. DPRD	4 Paket	150.000.000,0	APBD	INSIDENTIL
1.20.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor yang disediakan	Set. DPRD	3 Paket	73.449.200,0	APBD	RUTIN
1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Set. DPRD	12 Bulan	110.000.000,0	APBD	RUTIN
1.20.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Frekwensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Set. DPRD	1 tahun, 12 unit	140.000.000,0	APBD	INSIDENTIL
1.20.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekwensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Set. DPRD	12 Bulan	100.000.000,0	APBD	INSIDENTIL
1.20.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang dilaksanakan	Kantor DPRD	1 paket		APBD	INSIDENTIL
1.20.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur		82%	400.000.000,00		
1.20.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang disediakan	Set. DPRD	5 stel anggota DPRD, + 2 stel sekretariat	400.000.000,00	APBD	RUTIN

1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang dilatih		35%	110.000.000,00		
1.20.04.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Frekwensi Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Implementasi Perundang-undangan bagi Sekretariat DPRD	Set. DPRD	12 tahun	110.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah ketersediaan Rencana Kerja SKPD		7 Dokumen	60.000.000,00		
		Persentase Laporan Tepat Waktu		62%			
1.20.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja (Renstra, Renja RKT, PK, RKA, DPA, Laporan Keuangan,LAKIP,LPPD,LRA Per Bulan) yang disusun	Set. DPRD	4 Laporan	60.000.000,00	APBD	RUTIN
1.25.1.20.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi		81%	335.000.000,00		
1.25.1.20.04.15.11	Pembuatan Varia / Majalah/ Brosur	Jumlah Pembuatan Varia / Majalah DPRD Kab. Padang Pariaman	Set. DPRD	1 paket	80.000.000,00	APBD	
1.25.1.20.04.15.12	Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda	Jumlah pembuatan Buku Kalender dan buku agenda	Set. DPRD	1 paket	80.000.000,00	APBD	
1.25.1.20.04.15.13	Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman	Frekwensi peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya	Set. DPRD	12 Bulan	150.000.000,00	APBD	
1.25.1.20.04.15.14	Penyediaan dan Pengelolaan Media Informasi DPRD	Jumlah penyediaan dan pengelolaan Publikasi (media informasi dan website,running text) DPRD Kab. Padang Pariaman	Set. DPRD	1 paket	25.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Ranperda yang disetujui DPRD		10 Ranperda	17.232.850.000,00		
		Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti		100%			
		Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu		100%			

		Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD		72%			
		Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi		81%			
1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD	Set. DPRD	10 Ranperda	2.114.000.000,00	APBD	RUTIN
	uderan	Frekwensi penyusunan Ranperda Hak inisiatif Dewan		1 kali			
		Jumlah honor tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar/ tim ahli		8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)	230.400.000,00		
1.20.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Frekwensi Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama	Set. DPRD	5 kali	50.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat Fraksi DPRD yang difasilitasi	Set. DPRD	197 kali	150.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.15.04	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat rapat paripurna dprd yang difasilitasi	Set. DPRD	15 kali	175.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses dapil Anggota DPRD yang difasilitasi	Padang Pariaman	3 kali, 40 orang	750.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bimtek dan Workshop anggota DPRD yang difasilitasi	Luar Daerah	6 kali	2.000.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.15.11	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Frekwensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Padang Pariaman	12 Bulan	50.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.15.23	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Jumlah Layanan Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Set. DPRD	12 Bulan	2.488.000.000,00	APBD	RUTIN
1.20.04.15.24	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah	Frekwensi agenda kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Set. DPRD	2 kali	2.100.000.000,00	APBD	RUTIN

1.20.04.15.25	Rapat koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi Lainnya	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi komisi / pansus, alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD	Dalam dan Luar Daerah	komisi /Pansus (3x Komisi, 3 x Pansus), BK (2 kali) , Banggar (2 kali), Bapemperda (2 kali), Bamus (2 kali), anggota DPRD (3 kali) ,Luar Daerah Dalam Propinsi (1 kali)dan plus sekretariat (pendamping), dan dalam daerah	6.525.450.000,00	APBD	RUTI
1.20.04.15.xx	Rapat-rapat paripurna Acara Tertentu	Jumlah rapat paripurna acara tertentu dalam rangka Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD, dan rapat rapat paripurna istimewa DPRD lainnya	Set. DPRD	6 kali	600.000.000,00	APBD	RUTI

Pariaman, Juli 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM NIP. 19680909 199803 1 010



LAMPIRAN II

TABEL HASIL PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MATRIX RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

TABEL KERJA PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2021 KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

URUSAN : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/			PEMETAAN	PERMENDA	AGRI NO. 90) TAHUN 2019		8 9 UNSUR PENDUK				
	Program/Kegiat an	Sub Kegiatan	KODE REKENING	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program		Urusan			
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	BELANJA													
	BELANJA													
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
	Gaji ASN		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Administr asi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH		Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN			
	Gaji DPRD		4.02.02.2.02.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang disediakan	Layanan Keuangan dan Kesejahte raan DPRD		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN		Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN			
	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				Jumlah BOP									
	BELANJA LANGSUNG													

1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan									
1.20.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	4.02.01.2.03.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaa n yang disediakan	Administr asi Umum	Presentas e Aministras i Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekwensi layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet yang dibayarkan	4.02.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekwensi layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet yang dibayarkan	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Frekwensi Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	4.02.01.2.03.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Frekwensi Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	4.02.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Kantor yang disediakan	4.02.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Kantor yang disediakan	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah Anggota DPRD dan Sekretariat	4.02.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar/Majala h Anggota	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT

		DPRD yang disediakan			DPRD dan Sekretariat DPRD yang disediakan		disediakan	DAERAH			AHAN
1.20.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Frekwensi Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-rapat Kantor	4.02.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekwensi Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-rapat Kantor	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi kegiatan konsultasi/ koordinasi Sekretariat DPRD	4.02.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekwensi kegiatan konsultasi/ koordinasi Sekretariat DPRD	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai kantor (jasa tenaga pramusaji, pramubakti, sopir, staf pimpinan DPRD, fraksi DPRD dan media informasi)	4.02.01.2.03.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk surat menyurat	Administr asi Umum	Presentas e Aministras i Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
		,		Penyelenggara an Administrasi, Ketatausahaa n Dan Kepegawaian DPRD	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk Penyelenggara an Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD						
				Penyelenggara an administrasi keuangan DPRD	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untukPenyelen ggaraan administrasi keuangan DPRD						

			4.02.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk sopir sekwan sopir sekretariat	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
			4.02.02.2.01.03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk pendamping fraksi	Layanan Administr asi DPRD	Persentas e Layanan Administra si DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
			4.02.02.2.01.02	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk pramusaji rapat dan pendamping AKD	Layanan Administr asi DPRD	Persentas e Rapat Alat Kelengkap an Dewan dan Fraksi yg difasilitasi	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
			4.02.03.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk operator website	Peningkat an Kapasitas DPRD	Persentas e Dokument asi dan Publikasi Tugas dan Fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.01.21	Penyediaan jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Frekwensi Pelaksanaan medical check up bagi Anggota DPRD dan keluarga.	4.02.02.2.02.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Frekwensi Pelaksanaan medical check up bagi Anggota DPRD dan keluarga.	Layanan Keuangan dan Kesejahte raan DPRD	Persentas e Layanan Keuangan dan Kesejahter aan DPRD yang disediakan	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana									
1.20.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang	4.02.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	Persentase pelayanan administrasi yang	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN

		disediakan			Dua yang disediakan		yang disediakan	HAN DAERAH	disediakan		PEMERINT AHAN
1.20.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	4.02.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor yang disediakan	4.02.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor yang disediakan	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	4.02.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi Pemeliharaa n Berkala Gedung Kantor	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Frekwensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal	4.02.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Frekwensi Pemeliharaa n Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Opera sional	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekwensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.02.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekwensi Pemeliharaa n Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang dilaksanakan	4.02.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Bera t Gedung Kantor yang dilaksanakan	Administr asi Umum	Presentas e Administra si Umum yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur									

1.20.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang disediakan	4.02.02.2.02.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang disediakan	Layanan Keuangan dan Kesejahte raan DPRD	Persentas e Layanan Keuangan dan Kesejahter aan DPRD yang disediakan	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang dilatih									
1.20.04.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Frekwensi Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Implementasi Perundang- undangan bagi Sekretariat DPRD	4.02.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Frekwensi Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Implementas i Perundang- undangan bagi Sekretariat DPRD	Peningkat an Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentas e Aparatur yang dilatih	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah ketersediaan Rencana Kerja SKPD									
1.20.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja (Laporan Keuangan,LAK IP,LPPD,LRA Per Bulan) yang disusun	4.02.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja (Laporan Keuangan LRA Per Bulan) yang disusun	Administr asi Keuangan	Persentas e Laporan Tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase Rencana Kerja OPD yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
			4.02.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja (Laporan Keuangan,LA	Perencan aan dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Persentas e Laporan Tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase Rencana Kerja OPD yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN

	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran OPD	Jumlah Rencana Kerja (Renstra, Renja RKT, PK, RKA, DPA) yang disusun	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renstra, Renja RKT, PK, RKA, DPA) yang	Perencan aan dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Persentas e Laporan Tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentase Rencana Kerja OPD yang disediakan	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.25.1.20.04 .15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi			disusun						
1.25.1.20.04.1 5.11	Pembuatan Varia / Majalah/ Brosur	Jumlah Pembuatan Varia / Majalah DPRD Kab. Padang Pariaman	4.02.03.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pembuatan Varia / Majalah DPRD Kab. Padang Pariaman	Peningkat an Kapasitas DPRD	Persentas e Dokument asi dan Publikasi Tugas dan Fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.25.1.20.04.1 5.12	Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda	Jumlah pembuatan Buku Kalender dan buku agenda			Jumlah pembuatan Buku Kalender dan buku agenda	Peningkat an Kapasitas DPRD	Persentas e Dokument asi dan Publikasi Tugas dan Fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.25.1.20.04.1 5.13	Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman	Frekwensi peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya			Frekwensi peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya	Peningkat an Kapasitas DPRD	Persentas e Dokument asi dan Publikasi Tugas dan Fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN

1.25.1.20.04.1 5.14	Penyediaan dan Pengelolaan Media Informasi DPRD	Jumlah penyediaan dan pengelolaan Publikasi (media informasi dan website,runnin g text) DPRD Kab. Padang Pariaman			Jumlah penyediaan dan pengelolaan Publikasi (media informasi dan website,runnin g text) DPRD Kab. Padang Pariaman	Peningkat an Kapasitas DPRD	Persentas e Dokument asi dan Publikasi Tugas dan Fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1 20 01 15	D	Danie de									
1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Ranperda yang disetujui DPRD									
		Keputusan DPRD yang ditindaklanj uti									
		Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan									
		yang dilakukan									
		tepat waktu Cakupan									
		aspirasi masyarakat yang ditindaklanj uti DPRD									
		Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi									
1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD	4.02.03.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD	Pembent ukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentas e Perda dan Peraturan DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ranperda yang disetujui DPRD	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN

Jumlah penyusunan Ranperda Hak inisiatif Dewan			Jumlah penyusunan Ranperda Hak inisiatif Dewan						
Jumlah tenaga ahli fraksi dan kegiatan fraksi DPRD yang difasilitasi	4.02.02.2.01.03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kegiatan fraksi DPRD yang difasilitasi	Layanan Administr asi DPRD	Persentas e Layanan Administra si DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
	4.02.03.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	Peningkat an Kapasitas DPRD	Persentas e Layanan Kapasisas DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitas	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
	4.02.03.2.02.01	pembahasan KUA dan PPAS	Frekwensi Pembahasan KUA dan PPAS	Pembaha san Kebijakan Anggaran	Persentas e Kebijakan yang disetujui	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitas	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
	4.02.03.2.02.02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Frekwensi Pembahasan KUPA dan PPAS	Pembaha san Kebijakan Anggaran	Persentas e Kebijakan yang disetujui	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitas	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
	4.02.03.2.02.03	Pembahasan APBD	Frekwensi Pembahasan APBD	Pembaha san Kebijakan Anggaran	Persentas e Kebijakan yang disetujui	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitas	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN

			4.02.03.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Frekwensi Pembahasan APBD Perubahan	Pembaha san Kebijakan Anggaran	Persentas e Kebijakan yang disetujui	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitas	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
			4.02.03.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	Frekwensi Pembahasan Pertangungj awaban	Pembaha san Kebijakan Anggaran	Persentas e Kebijakan yang disetujui	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitas	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Frekwensi Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama	4.02.02.2.01.02	Fasilitasi Rapat DPRD	Frekwensi Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama	Layanan Administr asi DPRD	Persentas e Rapat Alat Kelengkap an Dewan dan Fraksi yg difasilitasi	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat Fraksi DPRD yang difasilitasi	4.02.02.2.01.02	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah Rapat rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat Fraksi DPRD yang difasilitasi	Layanan Administr asi DPRD	Persentas e Rapat Alat Kelengkap an Dewan dan Fraksi Yg difasilitasi	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.15.04	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat rapat paripurna dprd yang difasilitasi			Jumlah rapat rapat paripurna DPRD yang difasilitasi	Layanan Administr asi DPRD	Persentas e Rapat Paripurna DPRD yg difasilitasi	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses dapil Anggota DPRD yang difasilitasi	4.02.03.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses dapil Anggota DPRD yang difasilitasi	Penyerap an dan Penghimp unan Aspirasi Masyarak at	Persentas e Reses dapil Anggota DPRD yang difasilitasi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN

									difasilitasi		
1.20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bimtek dan Workshop anggota DPRD yang difasilitasi	4.02.03.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek dan Workshop anggota DPRD yang difasilitasi	Peningkat an Kapasitas DPRD	Persentas e Layanan Kapasisas DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.15.11	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Frekwensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah	4.02.03.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Frekwensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembanguna n dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Pengawa san Penyelen ggaraan Pemerint ahan	Persentas e Pengawas an Penyeleng garaan Pemerinta han	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.15.23	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Jumlah Layanan Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD						Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN
1.20.04.15.24	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah	Frekwensi agenda kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekwensi agenda kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah					Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN

1.20.04.15.25	Rapat koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi Lainnya	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi komisi / pansus, alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi komisi / pansus, alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD					Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERIN' AHAN
1.20.04.15.xx	Rapat-rapat paripurna Acara Tertentu	Jumlah rapat paripurna acara tertentu dalam rangka Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD, dan rapat rapat paripurna istimewa DPRD lainnya	4.02.02.2.01.02	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat paripurna acara tertentu dalam rangka Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD, dan rapat rapat paripurna istimewa DPRD lainnya	Layanan Administr asi DPRD	Persentas e Rapat Paripurna Acara Tertentu	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRA SI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretari at DPRD	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERIN' AHAN

Pariaman, Juli 2020

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM NIP. 19680909 199803 1 010



LAMPIRAN III

MATRIX RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

OPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

		INITAL						CAPAIAN KINF	RJA DAN KERANGKA	PENDANAA	N .		
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIA TAN/SUB	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIOR	RITAS	POK SASARA
			KEGIATAN		2019	TAHUN 2020	2021	INDIKATII (Rp.)		DANA	NASIO NAL	DAER AH	N
1	2	3	4	5	Rp 6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi umum yang disediakan										
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteaan ASN yang Disediakan										
	4.02.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan				12 Bulan	Rp 2.534.060.034	Sekretariat DPRD	APBD			Sekretar iat DPRD
	4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
	4.02.02.2.02	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteaan DPRD yang Disediakan										
	4.02.02.2.02. 01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Gaji,Tunjangan DPRD dan Jumlah BOP yang disediakan				12 Bulan	Rp 17.948.133.764	Sekretariat DPRD	APBD			Anggota DPRD
								20.598.099.200					

1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi umum yang disediakan Persentase Rencana Kerja OPD yang disediakan									
1)	4.02.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Tepat waktu					20.000.000				
1	4.02.01.2.01. 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renstra, Renja RKT, PK, RKA, DPA) yang disusun				5 Dokumen	10.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
2	4.02.01.2.01. 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja (Laporan Keuangan,LAKIP dan LPPD) yang disusun				3 Dokumen	10.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
2)	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Tepat waktu					126.400.000				
3	4.02.01.2.02. 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja (Laporan Keuangan LRA Per Bulan) yang disusun	Rp 150.000.000	Rp 41.302.525	Rp 50.000.000	12 Bulan	40.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
			Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 Orang)				12 Bulan	86.400.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
3)	4.02.01.2.03	Administrasi Umum	Presentase Aministrasi Umum yang disediakan					1.742.649.200				

4	4.02.01.2.03. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp 510.000.000	Rp 97.014.335	Rp 110.000.000	12 Bulan	110.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD
			Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk surat menyurat yang dibayarkan (4 Orang)				12 Bulan	86.400.000	Sekretariat DPRD		Sekretar iat DPRD
5	4.02.01.2.03. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekwensi layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet yang dibayarkan	Rp 862.000.000	Rp137.825.36 4	Rp 151.000.000	12 Bulan	170.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD
6	4.02.01.2.03. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Rp 175.000.000	Rp -	Rp -		15.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD
7	4.02.01.2.03. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Frekwensi Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK	Rp 381.000.000	Rp 161.860.000	Rp 250.000.000	12 Bulan	250.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD
8	4.02.01.2.03. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 575.000.000	Rp 154.605.950	Rp 150.000.000	12 Bulan	150.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD
9	4.02.01.2.03. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 60.000.000	Rp 9.652.000	Rp 10.000.000	12 Bulan	15.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD
10	4.02.01.2.03. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Rp 600.000.000	Rp 149.753.500	Rp 150.000.000	12 Bulan	175.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD
11	4.02.01.2.03. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 280.000.000	Rp 20.523.800	Rp 40.000.000	12 Bulan	40.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD
12	4.02.01.2.03. 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 620.000.000	Rp 149.892.400	Rp 100.000.000	12 Bulan	150.000.000	Luar dan Dalam Provinsi	APBD	Sekretar iat DPRD
13	4.02.01.2.03. 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Rp 907.000.000	Rp 195.360.000	Rp 150.000.000		150.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekretar iat DPRD

14	4.02.01.2.03. 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor yang disediakan	Rp 1.345.000.000	Rp -	Rp 70.000.000		73.449.200	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
15	4.02.01.2.03. 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekwensi Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Rp 300.000.000	Rp 161.302.600	Rp 100.000.000	12 Bulan	110.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
16	4.02.01.2.03. 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Frekwensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 804.000.000	Rp 217.472.975	Rp 110.000.000	12 Bulan	125.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
			Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai (sopir Sekwan) yang dibayarkan (1 Orang)		Rp -	Rp -	12 Bulan	22.800.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
17	4.02.01.2.03. 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekwensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 225.000.000	Rp 111.682.000	Rp 70.000.000	12 Bulan	100.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD
18	4.02.01.2.03. 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang dilaksanakan	Rp 600.000.000	Rp -	Rp -		-		APBD		Sekretar iat DPRD
4)	4.02.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang dilatih					110.000.000				
19	4.02.01.2.04. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Frekwensi Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Implementasi Perundang- undangan bagi Sekretariat DPRD	Rp 950.000.000	Rp 149.280.000	Rp 100.000.000		110.000.000	Luar dan Dalam Provinsi	APBD		Sekretar iat DPRD
II	4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD									
5)	4.02.02.2.01	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi yg difasilitasi					2.516.000.000				

		Persentase Rapat									
		Paripurna DPRD yg difasilitasi									
		Persentase Rapat									
		Paripurna Acara									
		Tertentu									
		Frekwensi Hearing									
		/ Dialog dan									
		Koordinasi dengan			_						
20	4.02.02.2.01. Fasilitasi Rapat DPRD	Pejabat	Rp 375.000.000	Rp	Rp		50,000,000	Sekretariat DPRD	APBD		Anggota
	02 Tasintasi Napat Bi NB	pemerintah Daerah dan Tokoh	375.000.000	10.087.000	35.000.000		50.000.000				DPRD
		Masyarakat									
		/Tokoh Agama									
		Jumlah Rapat-									
		rapat Alat									
		Kelengkapan	Rp	Rp	Rp			Sekretariat DPRD	APBD		Anggota
		DPRD dan Rapat	985.000.000	98.684.750	130.000.000		150.000.000	Sekretariat DPKD	APBD		DPRD
		Fraksi DPRD yang									
		difasilitasi									
		Jumlah rapat-	D	D	D						A
		rapat paripurna DPRD yang	Rp 795.000.000	Rp 124.262.300	Rp 124.000.000		175.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Anggota DPRD
		difasilitasi	793.000.000	124.202.300	124.000.000		173.000.000				DFKD
		Jumlah rapat-									
		rapat paripurna		Rp	Rp			Sekretariat DPRD			Anggota
		Acara tertentu		98.648.750	611.000.000		600.000.000	dan IKK	APBD		DPRD
		DPRD yang									
		difasilitasi Jumlah jasa						+			
		tenaga kerja non									
		pegawai untuk									Sekretar
		pramusaji rapat				12 Bulan	204 000 000	Sekretariat DPRD	APBD		iat
		dan pendamping					304.800.000				DPRD
		AKD (15 Orang)									
		yang dibayarkan									
24	4.02.02.2.01. Penyediaan Fasilitasi Fraksi	Jumlah kegiatan							ADDD		Anggota
21	03 DPRD	fraksi DPRD yang							APBD		DPRD
		difasilitasi Jumlah jasa									
		tenaga kerja non									
		pegawai untuk									Sekretar
		pendamping fraksi				12 Bulan	163.200.000	Sekretariat DPRD	APBD		iat
		(8 Orang) yang									DPRD
		dibayarkan									
		Pengadaan dan									
	Pengadaan dan	Pemeliharaan									
22	4.02.02.2.01. Pemeliharaan Kebutuhan 04 Rumah Tangga Pimpinan	Kebutuhan Rumah	Rp	Rp	Rp	12 Bulan	006 200 000	Sekretariat DPRD	APBD		Ketua
	04 Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Tangga Pimpinan DPRD yang	5.204.000.000	2.345.522.421	1.432.750.000		906.200.000				DPRD
	DEND										
		disediakan									

8)	4.02.03.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Ranperda Hak inisiatif Dewan Persentase Kebijakan yang disetujui					1.634.000.000	Sekretariat DPKD	APBU		DPRD
			Jumlah penyusunan						Sekretariat DPRD	APBD		Anggota
25	4.02.03.2.01. 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD	Rp 4.100.000.000	Rp 1.397.280.825	Rp 1.163.400.000	10 Ranperda	340.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Anggota DPRD
7)	4.02.03.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD					480.000.000				
		FUNGSI DPRD	DPRD yang difasilitasi Ranperda yang disetujui DPRD									
III	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi									
24	4.02.02.2.02. 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Frekwensi Pelaksanaan medical check up bagi Anggota DPRD dan keluarga.	Rp 8.419.000.000	Rp 13.806.000	Rp 117.000.000	1 Kali/Tahun	120.000.000	Luar dan Dalam Provinsi	APBD		Anggota DPRD
23	4.02.02.2.02. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang disediakan	Rp 1.018.625.000	Rp 686.029.200	Rp 476.000.000		400.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		Anggota DPRD
6)	4.02.02.2.02	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteaan DPRD yang Disediakan					520.000.000				
			Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk rumah dinas, Sespri, Ajudan dan Sopir Ketua (7 Orang) yang dibayarkan				12 Bulan	166.800.000	Sekretariat DPRD	APBD		Sekretar iat DPRD

26	4.02.03.2.02. 01	pembahasan KUA dan PPAS	Frekwensi Pembahasan KUA dan PPAS		Rp -		1 Kali/Tahun	373.500.000	Set.DPRD/Dalam Provinsi	APBD		nggota DPRD
27	4.02.03.2.02. 02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Frekwensi Pembahasan KUPA dan PPAS		Rp -		1 Kali/Tahun	373.500.000	Set.DPRD/Dalam Provinsi	APBD		nggota DPRD
28	4.02.03.2.02. 03	Pembahasan APBD	Frekwensi Pembahasan APBD		Rp -		1 Kali/Tahun	373.500.000	Set.DPRD/Dalam Provinsi	APBD		nggota DPRD
29	4.02.03.2.02. 04	Pembahasan APBD Perubahan	Frekwensi Pembahasan APBD Perubahan		Rp -		1 Kali/Tahun	373.500.000	Set.DPRD/Dalam Provinsi	APBD		nggota DPRD
30	4.02.03.2.02. 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Frekwensi Pembahasan Pertangungjawaba n		Rp -		1 Kali/Tahun	140.000.000	Set.DPRD/Dalam Provinsi	APBD		nggota DPRD
			Persentase									
9)	4.02.03.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					50.000.000				
31	4.02.03.2.03. 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Frekwensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah		Rp -		12 Bulan	50.000.000	Set.DPRD/Dalam Provinsi	APBD		
10)	4.02.03.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Layanan Kapasitas DPRD					2.608.600.000				
32	4.02.03.2.04. 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek dan Workshop anggota DPRD yang difasilitasi		Rp 2.429.828.125	Rp 1.882.500.000	6 Kali/tahun	2.000.000.000	Luar dan Dalam Provinsi	APBD		nggota DPRD
33	4.02.03.2.04. 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pembuatan Varia / Majalah DPRD Kab. Padang Pariaman	Rp 397.600.000	-	Rp 88.000.000	12 Bulan	80.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		nggota DPRD
			Jumlah pembuatan Buku Kalender dan buku	Rp 300.000.000	Rp -	Rp 96.000.000	12 Bulan	80.000.000	Sekretariat DPRD	APBD		nggota DPRD

			agenda									
			Frekwensi peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya	Rp 600.000.000	Rp 170.998.500	Rp 186.000.000	12 Bulan	150.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Anggot DPRD	
			Jumlah penyediaan dan pengelolaan Publikasi (media informasi dan website,running text) DPRD Kab. Padang Pariaman	Rp 150.000.000	Rp 9.424.000	Rp 16.000.000	12 Bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD	APBD	Anggot DPRD	
			Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai untuk operator website (2 orang)				12 Bulan	43.200.000	Sekretariat DPRD	APBD	Sekreta iat DPRD	
34	4.02.03.2.04. 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan		Rp 230.400.000	Rp 230.400.000	12 Bulan	230.400.000	Sekretariat DPRD	APBD	Anggot DPRD	
11)	4.02.03.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kunjungan Kerja Dalam Daerah Anggota DPRD yang difasilitasi Persentase Reses dapil Anggota DPRD yang					850.000.000				
35	4.02.03.2.05. 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	difasilitasi Frekwensi agenda kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah				3 Kali/Tahun	100.000.000	Dalam Provinsi	APBD	Anggot DPRD	
36	4.02.03.2.05. 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses dapil Anggota DPRD yang difasilitasi	Rp 1.753.120.000	Rp 308.930.500	Rp 732.000.000	3 Kali/Tahun	750.000.000	Dalam Provinsi	APBD	Anggot DPRD	
12)	4.02.03.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						9.940.450.000				
37	4.02.03.2.08. 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekwensi agenda kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 7.033.500.000	Rp 2.547.608.000	Rp 2.299.500.000	2 Kali/Tahun	2.000.000.000	Luar Provinsi	APBD	Anggot DPRD	

	Luar Daerah									
	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi komisi / pansus, alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD	Rp 17.415.140.000	Rp 6.907.419.802	Rp 7.600.410.000	12 Bulan	6.525.450.000	Luar dan Dalam Provinsi	APBD		Ang _l DP
	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ketua DPRD		Rp -		12 Bulan	1.315.000.000	Luar Provinsi	APBD		Ang _i DP
	Frekwensi Bimbingan Teknis Ketua DPRD		Rp -		6 X/Tahun	100.000.000	Luar dan Dalam Provinsi	APBD		Kei DP

Pariaman,

Juli 2020

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM NIP. 19680909 199803 1 010

harpan